

Komunitas Sebagai Agen Perdamaian: Pengukuran Batas Etnik sebagai Variabel Kajian Relasi Etnik di Alor Star, Malaysia dan Padang, Indonesia

Oleh: Afriva Khaidir

ABSTRACT

Social structure of society in Malaysia and Indonesia is a product of politic and colonial policy in the past. By relation among limited ethnic based on the form of plural society, both of these countries grow into new countries and the problems of ethnic become an important agenda in the process of countries development. As an indigene ethnic who has put on the edge, Malay race live side by side with some other ethnics like Chinese. Relationship among ethnics will develop easily become potential conflict without public administration in good government level. Using mixing methods among the surveys, focus group discussion, deep interview and ethnography observation in Alor Setar and Padang, this research is focused on searching the pattern on Neighborhood Association which is active and non active. It is also categorized based on the evaluation of government instance who has guided Neighborhood Association. Generally, the findings theory show that Neighborhood Association who is actively giving chances and choices to the citizen among ethnics and work out intensively. Minority of Chinese ethnic shows the level of good involvement, as Malay ethnic. They feel secure in their daily activities. Daily relationship and the institutions give the closeness among the citizen by doing some programs. Neighborhood Association do not emphasize the safety need and government agency in administrative sector just like in the beginning of its forming. It has reinforced the community although less economic efforts have done. Citizens' understanding about organization development in the future do not found yet

Kata Kunci: *Neighborhood associations, community, social structure, ethnic relations, peace studies*

I. PENDAHULUAN

Dalam 65 tahun kemerdekaannya, Republik Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang berkaitan dengan konflik etnik dalam sejarah pembentukan bangsanya. Dimulai dari pertikaian etnik sejak zaman kolonial sampai mengalami beberapa tragedi-tragedi besar seperti kerusuhan etnik di Solo tahun 1982 yang melibatkan orang Jawa dan Cina, kerusuhan besar secara nasional pada 13 Mei 1997, konflik di Maluku dari tahun 1999 sampai tahun 2002, dan konflik di Poso

Sulawesi Tengah yang masih berlangsung hingga sekarang sebagaimana juga sebagian konflik Aceh dan yang lain-lainnya.¹

Walaupun konflik yang melibatkan pertikaian suku dan kaum ini telah lama terjadi, namun hubungan antara orang pribumi Indonesia dan etnik Cina (atau dikenali sebagai *Tionghoa*) di tingkat nasional sampai kini sering

¹ Alo Liliweri . 2005. *Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKSI

disimpulkan masih tidak begitu baik dan erat, bagaikan api dalam sekam. Landler² menyatakan dalam laporannya pada kerusuhan etnik setelah reformasi 1998 bahwa:

“the ethnic Chinese account for 2 percent of Indonesia's population but own a majority of the nation's private wealth. With the economic crisis, it has resurfaced in a virulent form. Stores all over Medan carry signs that say they are owned by "pribumis," indigenous Indonesians. On some streets, burned-out Cina shops stand next door to pribumi shops that have not been touched”.

Tulisan Landler mencoba menunjukkan salah satu fakta betapa rapuhnya hubungan sosial di antara orang pribumi Indonesia dan etnik Cina. Mendukung pendapat di atas, Wibowo³ menyatakan sebagai sebab dari rapuhnya hubungan antara etnik Cina di Indonesia, ketika “Tragedi Mei 1998” meletup, harga yang harus dibayar memang tinggi, bahkan banyak yang tidak sanggup “membayarnya”, sehingga tidak sedikit yang meninggalkan negeri ini.

Meskipun demikian, jika bercermin kepada sejarah, hubungan yang harmonis juga tidak dapat dinafikan keberadaannya. Fenomena

batik Pekalongan di utara pulau Jawa merupakan sebuah simbol hubungan yang harmonis antara etnik Cina dan penduduk lokal. Betapa orang Cina melakukan asimilasi budaya sehingga motif batik Pekalongan menyerap motif-motif budaya Cina dan diterima secara baik sebagai sebuah versi yang sah di antara versi asli lainnya. Demikian juga masuknya agama Islam di tanah Jawa tidak dapat dipisahkan dari Sembilan Wali (*Walisongo*) sebagai pengembang agama Islam di tanah Jawa yang beberapa orang di antaranya beretnik Cina.

Ditemukannya fenomena harmonis di antara etnik yang terjadi di kedua negara yang berdekatan secara geografis, sama-sama dalam rumpun Melayu dan beragama Islam ini merupakan suatu yang menarik bagi penulis. Pada saat Indonesia kerap kali mengalami masalah dengan hubungan antara etnik, Malaysia secara relatif terhindar dari hal ini. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Mansor⁴ menyatakan bahwa Malaysia menikmati kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, stabil, dan keharmonisan etnik. Dalam analisis perbandingan yang dilakukannya tahun 1999 tentang potensi agama dalam konflik sosial di negara Malaysia dan Indonesia yang berjiran ini dikaitkan dengan beberapa perbedaan di antara kedua negara ini.

Sehubungan dengan ini, Wang Gung Wu dalam Wibowo⁵ menyimpulkan bahwa berbeda

² Landler, Mark. 1998. *Riots Bare Ethnic Hatreds in Indonesia*. *New York Times*, May 8, 1998

³ I. Wibowo (editor). 2000 *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Diterbitkan atas kerjasama Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina. Jakarta: PT Gramedia

⁴ Mansor. 2004 *Managing Ethnic Harmony in Malaysia: Trends and Issues in 2004*. Unpublished paper. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

⁵ I. Wibowo. *Op cit*.

dengan Burma, Kamboja, Vietnam dan Filipina, integrasi etnik Cina dalam pembangunan kebangsaan di Malaysia dan Indonesia adalah berbeda dan lebih kompleks. Berdasarkan konsepsi beliau, salah satu faktor yang paling penting dalam perpertanyaan ini adalah kenyataan bahwa Malaysia dan Indonesia adalah bangsa yang baru. Oleh karena itu peranan dan pola keterlibatan pemerintah kolonial dalam hubungannya dengan integrasi etnik keturunan asing dengan etnik pribumi di bangsa baru ini menjadi sangat vital⁶. Walaupun demikian untuk memberikan fokus lebih baik kepada kajian yang dilakukan, diberikan penekanan kepada keinginan untuk mengetahui bagaimana dasar dan hubungan sosial di peringkat akar rumput bekerja dalam menciptakan perdamaian antar etnik ini dalam kedua bangsa, Malaysia dan Indonesia. Hal ini dikaji melalui *unit analysis* tentang potensi Rukun Tetangga sebagai sebuah organisasi kejuranan yang terbukti menjadi sebuah fenomena organisasi kemasyarakatan yang diberi nama persis sama dengan yang juga ada di Indonesia.

Rukun Tetangga di Indonesia merupakan aplikasi dari konsep persatuan kejuranan. Beberapa sarjana menggunakan istilah "*neighborhood association*"⁷ Seba-

gian lagi menyebutnya sebagai "*urban locality groups*" atau "*urban community*". Karena Rukun Tetangga pada umumnya berada dalam lingkungan di kawasan perkotaan, dan mewakili suatu kelompok setempat di kawasan perkotaan. Satu Rukun Tetangga terdiri dari beberapa (30 hingga 50 Ketua Rumah-KR/Kepala Keluarga-KK) dan di Indonesia, satu Rukun Warga/RW terdiri dari beberapa (3 hingga 5 buah) Rukun Tetangga (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 tahun 2002).

Dwianto⁸ berpendapat bahwa sebagai organisasi kejuranan di Indonesia, Rukun Tetangga diberikan tugas dan fungsi oleh pemerintah untuk memajukan dan membantu proses integrasi di antara warga dan hubungan antara warga dengan Negara. Di samping itu, Rukun Tetangga secara komprehensif juga diharapkan mengatur urusan-urusan harian di dalam komunitas. Karena itu, Rukun Tetangga telah ditentukan tugas mereka oleh Negara. Pendekatan melalui mekanisme "*top-down*" seperti ini pada masa Orde Baru adalah pemikiran utama keberadaan Rukun Tetangga di Indonesia.

Kebijakan populis yang dimulai melalui sistem administrasi negara di kawasan perkotaan dan pedesaan melalui pemerintahan daerah dilakukan melalui kawalan yang ketat dari pemerintah. Partisipasi masyarakat yang terjadi bukanlah sebuah partisipasi yang tulus (*genuine participation*) namun lebih kepada partisipasi yang tersamar (*pseudo participation*). Sebagai kebijakan yang paralel dengan strategi

⁶ Hefner, Robert W (editor). 2001. *Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press

⁷ Dwianto, Raphaella D. 2000. *The Existing Form of Urban Locality Groups in Jakarta: Reexamining the RT/RW in the post-New Order Era*. Atmajaya Catholic University Indonesia

⁸ *Ibid*

untuk menubuhkan sebuah jaringan struktur korporatis untuk menjaga kekuasaan negara pada paras akar rumput pemerintahan Orde Baru melakukan penataan semula struktur pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan pelancaran Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pemerintah Pusat di Jakarta melalui undang-undang ini menjanjikan akan diberikannya desentralisasi politik dan kekuasaan serta menggalakkan partisipasi masyarakat di peringkat akar rumput. Namun pada kenyataannya, undang-undang ini menjadi alat bagi pemerintah untuk melaksanakan kawalan yang ketat di peringkat paling bawah dari struktur Negara. Melalui undang-undang ini pemerintahan yang mengandungi partisipasi publik melalui pimpinan yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Marga di Sumatera Selatan, Gampong di Aceh dan lain-lain digantikan oleh sebuah struktur pemerintahan yang penuh keseragaman dengan sebutan Desa di kawasan luar perkotaan dan Kelurahan di kawasan perkotaan. Dua istilah yang secara budaya berasal dari bahasa Jawa tetapi dalam kenyataannya hanyalah sebagai pengesahan dari keinginan rejim Orde baru untuk mengendalikan masyarakat di peringkat akar rumput.

Pada peringkat desa dan kelurahan, pemimpin yang dipilih oleh warga dan “membumi” digantikan oleh sejumlah besar pegawai pemerintahan dan menjadi

bahagian dari struktur administrasi negara. Dikotomi antara “desa” dan “kelurahan” menimbulkan dua kelas kepemimpinan di peringkat desa yaitu yang diangkat dan dipilih. Kepemimpinan di kawasan perkotaan dikendalikan oleh pemimpin yang memiliki status pegawai Negara. Yoshihara and Dwianto⁹ menganggap ini sebagai “*the implication of the restructuring of the governmental system has reduced the autonomy of society and weakened society vis-a-vis the state*”.

Demikianlah kedudukan Rukun Tetangga pada saat awal dibentuknya yang didirikan di Jakarta tahun 1966. Walaupun Rukun Tetangga membawa berbagai macam bentuk pelayanan, namun fungsi terasnya sebenarnya bukanlah untuk melayani masyarakat namun lebih digunakan pada saat pertama pembentukannya untuk mengendalikan masyarakat¹⁰. Sebagai instrumen negara tidaklah terlalu mengejutkan jika mereka mungkin telah digunakan untuk membantu kemenangan partai berkuasa yaitu Golkar untuk memenangi Pemilihan Umum tahun 1977, 1982 dan 1987. Meskipun pada keadaan sehari-hari Rukun Tetangga berfungsi sebagai perantara informasi dan perundingan antara Negara dengan masyarakat.

Kajian-kajian tentang komunitas menyatakan bahwa organisasi-organisasi tempatan yang terdiri dari

⁹ Yoshihara, Naoki and Raphaella Dewantari Dwianto. 2003. *Grass roots and the Neighborhood Associations on Japan's Chonakai and Indonesia's RT/RW*. Jakarta:Grasindo

¹⁰ Sullivan, J.A. 1980. *Back Alley Neighborhood: Kampung as Urban Community in Yogyakarta*. Melbourne Centre of Southeast Asian Studies Monash University (Working Paper no. 18)

masyarakat sipil atau masyarakat madani merupakan potensi yang kuat untuk mencegah berbagai bentuk perpecahan yang berpotensi menciptakan konflik. Perubahan sosial yang terjadi melalui reformasi dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan peralihan kekuasaan. Keadaan kekosongan sosial yang terjadi ini mengundang potensi berlakunya konflik dalam komunitas yang mendapatkan kebebasan dari perjuangan reformasi. Oleh karena itu, salah satu alternatif potensi terbesar dalam meredakan konflik melalui penciptaan hubungan dan perdamaian antara etnik adalah pembinaan hubungan di peringkat kehiranan. Hal ini menjadi relevan manakala hubungan antara elit di peringkat Negara tidak terbina hubungan yang erat, dan ada jarak antara Negara dengan warga di paras akar rumput. Begitu juga karena pembinaan di peringkat keluarga kurang memberikan pengaruh secara sosial yang bermakna.

Pertanyaan penelitian ini dalam kajian ini dibatasi hanya pada beberapa aspek saja. Penelitian akan menilai secara deskriptif kesan Rukun Tetangga selepas tahun 2000 di kawasan perkotaan di dua lokasi. Lokasi pertama adalah Perkotaan Alor Setar, Negeri Kedah Darul Aman di Malaysia. Lokasi ini di pilih karena diasumsikan mewakili karakteristik keragaman etnik. Alor Setar diandaikan memiliki karakteristik demografi Malaysia secara keseluruhan dengan dominasi populasi bangsa Melayu. Populasi dominan pada peringkat selanjutnya adalah bangsa Cina.

Penelitian di Indonesia dilakukan di Kota Padang. Kota ini

merupakan sebuah perkotaan yang memiliki majoritas penduduk Minangkabau. Minangkabau merupakan sebuah bangsa yang dengan meminjam konsep *canopy pluralism* berada pada puak Melayu. Perkotaan ini memiliki komposisi penduduk Cina yang cukup bermakna. Padang juga merupakan sebuah wilayah perperkotaan yang berkembang cepat dan berbagai budaya. Kota Padang juga mewakili wilayah yang pernah mengalami kerusuhan etnik pada beberapa masa yang lalu terutama pada masa peralihan kekuasaan politik Indonesia tahun 1997.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Meskipun sudah banyak kajian ilmu sosial dilakukan tentang Malaysia, Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi sejauh ini belum banyak dilakukan kajian perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Heryanto dan Mandal¹¹ menyatakan bahwa kajian perbandingan antara dua negara selalunya hanya merupakan bahagian umum dari kajian Asia Tenggara. Salah satu kajian perbandingan yang cukup berpengaruh adalah kajian yang dilakukan oleh Syed Farid Alatas¹² dalam disertasi doktoralnya yang akhirnya dibukukan pada tahun 1997 tentang Demokrasi dan Otoritarianisme di Indonesia dan Malaysia. Dalam bukunya ini Syed Farid Alatas melakukan pemerhatian yang penting, jujur dan tepat bahwa

¹¹ Ariel Heryanto & Sumit K Mandal (editor). 2004. *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara: perbandingan dan pertautan antara Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia

¹² *Ibid*

“there has not been any comparative work done on the state in Malaysia and Indonesia”. Pernyataan yang sama diajukan juga oleh Heryanto dan Mandal dalam bukunya pada tahun 2004. Buku yang meletakkan Heryanto dan Mandal sebagai editor ini merupakan kerjasama antara beberapa pakar ilmu sosial dari dua negara dengan juga mengambil kira tema-tema gender, politik, undang-undang dan sastera.

Kedua kajian di atas pada dasarnya melakukan penekanan dalam aspek politik. Mansor¹³ justru melakukan perbandingan tentang konflik sosial di antara dua negara. Beliau mempersoalkan sebab dari konflik di antara kaum dalam dua negara serantau dan hubung kaitnya dengan aspek keagamaan.

Namun demikian satu tulisan yang sangat baik dan memberikan wacana konseptual dan layak dijadikan rujukan tentang perbandingan hubungan dan kebijakan di bidang politik keragambudayaan di kawasan Asia Tenggara adalah penelitian yang dibiayai oleh The Ford Foundation yang akhirnya ditulis dalam bentuk buku dengan tajuk *The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia* yang diterbitkan tahun 2007. Karya penting ini merupakan sebuah kompilasi pemikiran. Namun Robert Hefner¹⁴ dalam bahagian pendahuluan membahaskan aspek konseptual dan historis keberadaan

pluralisme dan kewarganegaraan berkembang di Asia Tenggara dengan mengambil kasus Malaysia, Indonesia dan Singapura.

Akhirnya, belum ditemui kajian perbandingan Malaysia dan Indonesia yang mengkaji secara fokus bagaimana pelaksanaan manajemen publik terhadap masyarakat sivil bekerja sehari-hari. Secara *de facto* wajah manajemen pemerintahan yang nyata adalah dalam bentuk aparaturnya publik dan norma kenegaraan yang berhubungan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diakui bahwa pergerakan manajemen masyarakat di peringkat akar rumput sangat ditentukan oleh percaturan politik di peringkat kebangsaan. Alfitra Salamm dalam Heryanto dan Mandal¹⁵ secara jelas memperakui bahwa Rukun Tetangga dan *Kelurahan* di Indonesia sebagai perkumpulan masyarakat di peringkat akar rumput ternyata di satu sisi merupakan bentuk campur tangan Negara di tengah-tengah masyarakat. Ini karena hubungan institusi sosial dengan manajemen Negara di tengah masyarakat ini akan sangat baik kalau dikaji dengan menggunakan metode perbandingan.

Jika dipandang dari aspek epistemologi, metode perbandingan yang diguna dalam kajian ini adalah mengambil pelajaran dari metode yang dipakai oleh ilmu murni (*natural sciences*). Namun kajian perbandingan dalam ilmu sosial bukanlah sesuatu yang sangat baru meskipun telah sempat mengalami kehilangan kuasa untuk berkembang

¹³ Mansor. 1999. *Crossing Ethnic Borders in Malaysia: measuring the fluidity of ethnic identity and group formation*. Akademika 55 Julai 1999

¹⁴ Hefner, Robert W (editor). 2001. *Op cit*.

¹⁵ Ariel Heryanto & Sumit K Mandal (editor). 2004. *Op cit*.

akibat perang dunia kedua. Namun bidang ini kembali mengalami popularitinya pada saat-saat terakhir ini. Robert K. Merton dalam Vallier¹⁶ menyatakan bahwa pada saat sosiologi menjadi disiplin ilmu sendiri yang memiliki komitmen tentang penggunaan metode perbandingan di antara masyarakat, budaya dan bermacam-macam organisasi yang terdapat di dalamnya.

Banyak pakar seperti Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Herbert Spencer dan Wilfredo Pareto menyatakan kajian perbandingan sebagai cara mencari bukti dalam penerokaan ilmu sosial¹⁷. Perkembangan menunjukkan bahwa kajian perbandingan hanya diandaikan untuk mencari suatu kecenderungan dan generalisasi. Namun begitu kajian perbandingan berperan juga untuk mencari keunikan sebagaimana dilakukan oleh Weber dalam kajiannya tentang Calvinisme. Oleh karena itulah Talcott Parsons dalam Vallier¹⁸ menyatakan bahwa di samping mencari kesamaan dan kecenderungan, yang lebih penting dalam sebuah kajian perbandingan dalam ilmu sosial adalah penerokaan untuk menemukan sesuatu dalam organisasi atau institusi yang penting untuk dijelaskan. Oleh demikian ia bukanlah sebuah pencarian menuju kesimpulan umum tetapi lebih

kepada penemuan hal-hal baru melalui sebuah kajian penerokaan.

Sidney Verba dalam Vallier¹⁹ menyatakan bahwa penelitian dan pengkajian yang bertujuan untuk memahami sesuatu bangsa haruslah dijalankan di peringkat antara negara. Hal ini dilakukan melalui sebuah kajian perbandingan yang paralel menggunakan sebuah strategi untuk perbandingan yang relevan. Ini bertujuan untuk memperbandingkan dua kajian yang masing-masingnya adalah bebas. Berbagai metode kajian lintas negara juga sangat bermanfaat untuk memahami proses politik karena alamnya yang multikonteks dan pengakuan bahwa masing-masing merupakan negara berbeda.

Gerakan Reformasi di Indonesia dimulai dengan krisis ekonomi pada tahun 1996 dan disusul dengan kejatuhan Presiden Jenderal Soeharto sebagai ikon regim Orde Baru. Situasi ini memberi begitu banyak perubahan dalam dasar komunitas di Indonesia, terutamanya di perkotaan-perkotaan besar. Secara nasional, keadaan berikutnya selepas tahun 1999 cenderung memberikan kebebasan yang lebih substansial kepada masyarakat sipil sekaligus melemahkan kekuasaan Negara dalam mengendalikan kehidupan masyarakat. Sebagai kesan berikutnya, kolumnis N.D. Kristof dalam New York Times 25 Mei tahun 1998 berpendapat bahwa kebebasan baru di Indonesia memberi peluang kepada berlakunya konflik antar etnik. Perkotaan sebagai kawasan padat penduduk yang bersifat plural berpotensi terhadap

¹⁶ Vallier, Ivan (*editor*). 1973.. *Comparative Methods in Sociology: Essays on Trends and Applications*. Published under auspices of the Institute of International Studies University of California Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

konflik dan ketegangan etnik ini. Keadaan sosial yang jika tidak diurus dengan baik akan meledak menjadi konflik yang nyata.

Nurhadiantomo²⁰ yang mengikuti pemikiran Ralf Dahrendorf, berkonsepsi bahwa konflik sosial terdiri dari 'konflik tersurat' atau 'konflik manifest' dan 'konflik tersirat' atau 'konflik laten'. Konflik tersirat sangat sulit untuk diungkapkan. Manakala konflik manifest yang terjadi pada antara 13 hingga 15 Mei tahun 1997 di beberapa perkotaan utama di Indonesia seperti Jakarta, Solo, Yogya termasuk Padang. Konflik ini menampilkan diri berupa kekerasan kolektif dalam bentuk kerusuhan dalam skala besar yang memakan korban termasuk komunitas Cina yang diakibatkan oleh tindakan 'spontan' kaum pribumi. Peristiwa ini berbentuk kerusuhan, pembakaran, mencuri harta benda, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Tidak lama setelah kerusuhan itu ramai orang Cina yang melarikan diri ke luar negara. Menurut data dari pemerintah Indonesia yang kemungkinan angka sebenarnya lebih besar, jumlah warga negara Indonesia keturunan Cina meninggalkan Indonesia menyentuh angka 80 ribu orang. Mereka adalah 1.5 persen dari penduduk Cina Indonesia yang berasal dari kelas menengah yang mempunyai kekuatan finansial untuk lari ke luar negara²¹. Sebagian

mereka mengalami trauma dan memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Indonesia. Meskipun banyak pihak beranggapan mereka masih menjadi sebagian dari bangsa Indonesia, namun ada keraguan bahwa orang Indonesia asli akan dapat menerima mereka sebagai anggota bangsa Indonesia ataupun tidak.

Persitiwa di atas merupakan gejala keruntuhan sosial yang mengindikasikan betapa rapuhnya sistem sosial yang ada. Banyak kajian menunjukkan keadaan ini dan telah dimulai sejak dahulu²². Sementara itu, perpaduan bangsa merupakan salah satu dari permasalahan yang senantiasa menjadi perhatian utama dari pemerintah Negara Malaysia. Shamsul Amri²³ mengistilahkan perpaduan di Malaysia sebagai berada dalam keadaan '*stable tension*'. Keadaan yang secara tersurat terlihat aman damai, namun secara tersirat wujud keadaan yang mengandungi ketegangan dan kecurigaan di antara kaum yang terlibat. Dalam sejarah Malaysia terdapat beberapa peristiwa penting yang sentiasa mengingatkan akan risiko yang terkandung dalam masalah perpaduan kaum ini. Diantara yang merupakan titik hitam ialah peristiwa 13 Mei 1969 yang

²⁰ Nurhadiantomo. 2004. *Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial Pro-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

²¹ Leo Suryadinata (editor). 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: LP3ES

²² Alo Liliweri. 2005. *Op cit.* Nurhadiantomo. 2004. *Op cit.* Landler, Mark. 1998. *Op cit.*

²³ Shamsul Amri Baharuddin. 2005. Making Sense of National Unity in Malaysia: 'Break-down' versus 'break out' Perspectives. In Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

menimbulkan cacat politik, ekonomi, sosial dan psikologi di kalangan masyarakat Malaysia.

Comber²⁴ menyimpulkan bahwa ini mencerminkan setidaknya adanya '*Sino-Malay friction*' terjadi. Kedua kutub memiliki persepsi yang sangat berbeda. Orang Cina diandaikan sebagai *xenophobic* dan *sinocentric*. Manakala struktur sosial dan keagamaan kaum Melayu tidak memungkinkan untuk kelompok etnik dan agama lain, kecuali Arab atau India Muslim (disebut *Mamak*) untuk berintegrasi dengan mereka. Perkawinan silang di antara kedua komunitas Melayu dan Cina yang diharapkan dapat memecah dinding perkauman jarang sekali terjadi. Bagaimanapun keretakan antara etnik masih terus mengancam. Silong²⁵ menyatakan bahwa pada peristiwa Kampung Medan, Selangor tanggal 12 Maret 2002 terjadi sebagai manifestasi ketegangan antara etnik Melayu dengan etnik India yang mengorbankan tujuh nyawa. Begitu juga insiden di Kampung Rawa Pulau Pinang pada tahun 1997 dengan skala yang tidak begitu masif dan tanpa korban nyawa.

Masalah perpaduan bangsa tidak hanya berskala nasional namun juga melangkah menjadi masalah kawasan regional di rantau Asia Tenggara dan Asia. Hingga saat ini masih berlangsung pelarian modal (*capital flight*) yang mengiringi

pasca tragedi Mei 1998 di Indonesia. Isu ini akhirnya terus berkembang menjadi masalah hubungan antara bangsa utamanya dalam hal kasus perjanjian ekstradisi dan perpindahan modal antara Indonesia dengan Singapura.

Skema Rukun Tetangga di Malaysia pertama dimulai ketika pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdul Razak pada 29 Agustus 1975. Pada saat awal skema ini ditubuhkan di sektor Rukun Tetangga Kampung Kasipillay, Kuala Lumpur. Pada saat awalnya skema ini bertugas untuk menjaga keselamatan kejiranan di lokasi-lokasi tertentu yang disebut sebagai "sektor". Gerakan ini merupakan reaksi dari Negara terhadap serangkaian peristiwa yang mengancam perpaduan nasional pada masa itu. Skema ini dimaksudkan untuk memperkasakan komunitas. Di bawah skema ini warga saling menyokong di antara satu sama lain untuk memastikan keamanan rumah dan kawasan tempat tinggal mereka, secara popular disebut sebagai aktivitas "rondaan".

Rukun Tetangga adalah salah satu wujud program yang digolongkan kepada konsep pembangunan komunitas dalam bentuk organisasi. Jabatan Perpaduan Negara menyatakan pembangunan kawasan perkotaan adalah salah satu bahagian dari pembangunan komunitas di Malaysia.. Pembangunan keperkotaan adalah satu di antara kepentingan tertinggi dalam pemerintahan karena mengurangkan angka kemiskinan di perkotaan adalah syarat yang sangat penting untuk menjamin adanya keselamatan dan kestabilan negara untuk jangka panjang.

²⁴ Comber, Leon. 1983. 13 May 1969: *A Historical Survey fo Sino-Malay Relations*. Kuala Lumpur: Heinemann Asia

²⁵ Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

Kawasan perkotaan di Malaysia yang bercorakkan berbagai budaya dan etnik yang memberikan tantangan tertentu. Seandainya tantangan ini dapat dihadapi dengan baik, maka kejayaan pembangunan bangsa dapat dipastikan semakin mudah untuk dicapai. Perpaduan bangsa merupakan tujuan utama Negara, maka pembangunan komunitas harus berbentuk pembinaan hubungan antara etnik dalam erti kata saling memahami di antara berbagai etnik dan terciptanya harmonis dan perdamaian. Oleh demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kawasan perperkotaanan, aktivitas dan program yang bertujuan untuk menjalin kedamaian antara etnik sangat diperlukan. Di antara program yang terpenting ialah program Hubungan Komunitas dan Rukun Tetangga.

Pada masa awal program Hubungan Komunitas tanggal 19 Desember 1974, Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa pada saat itu merupakan pertama kali program pembangunan komunitas yang bercorakkan perpaduan dicadangkan dan dimulai di kawasan perkotaan. Secara umum program ini bertujuan untuk menggalakkan kawasan yang luas untuk menjalin saling kerjasama di antara berbagai etnik di komunitas perkotaan. Secara berterusan program ini mencipta kerjasama yang rapat di antara masyarakat dan Negara. Program Hubungan Komunitas ini dicadangkan dan dilaksanakan oleh Jabatan Integrasi Nasional melalui Jabatan Hubungan Komunitas di pusat-pusat perkotaan. Sempena pelancaran program, berbagai aktiviti dilaksanakan

bermula dari taman kanak-kanak hingga kepada kunjungan integrasi, kam-panye dan lain-lain.

Aspek yang lain dari pembangunan komunitas di kawasan perkotaan adalah pendirian skema Rukun Tetangga. Pada saat pertama, skema ini hanyalah murni sebagai skema keselamatan. Melalui skema ini, sektor-sektor Rukun Tetangga didirikan. Biro yang terbentuk pada peringkat awal ini termasuk jawatankuasa kawasan, jawatankuasa keselamatan dan jawatan kuasa pendaftaran. Selanjutnya ini meletakkan tanggungjawab bersama-sama untuk mempertahankan keselamatan dan kesejahteraan negara di bahu rakyat sendiri. Tugas dan kewajiban ini mencakup juga: pendampingan sosial, meningkatkan ekonomi dan berdikari, pendidikan dan memperkasakan komunitas.

Dalam Konvensi Rukun Tetangga 2003²⁶ Rukun Tetangga dialamatkan guna mempercepat dan memperlancar proses pemantapan perpaduan dan integrasi nasional. Oleh demikian dirasakan penting untuk dikaji bagaimana korelasi dan orientasi skema Rukun Tetangga dalam pemikiran integrasi bangsa. Maknanya Rukun Tetangga merupakan bentuk manajemen komunitas dalam upaya penciptaan perdamaian antara etnik di Malaysia. Negara misti mengambil tindakan dalam mengurus masalah kelompok wilayah ini sebagai dasar dalam pembinaan kebangsaan. Demi mengenalpasti masalah dan meng-

²⁶ Yahya Ibrahim. 1995. *Pembandaran dan Kejiranan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

uruskan keberbagaian, Negara telah menubuhkan sebuah jabatan khusus untuk menangani permasalahan hubungan kaum. Institusi ini dinamakan Jabatan Perpaduan Negara yang diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Pada tahun 2004, jabatan ini akhirnya dipindahkan ke bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Jabatan ini menjadi bertanggung jawab terhadap program skema Rukun Tetangga yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan antara etnik di peringkat komuniti.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan dalam kajian ini adalah penelitian perbandingan yang memiliki sifat eksploratif yang dilaksanakan di antara dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Sifat eksploratori digunakan karena belum ada kajian yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penyelidik lain. Pada tiap-tiap negara diambilkan komuniti sebagai *unit analysis* yaitu kelompok wilayah yang menerapkan program skema Rukun Tetangga. Adalah penting untuk menyampaikan keterbatasan dan kelemahan kajian ini. Mengingat belum adanya penelitian serupa sebelumnya, maka analisis akan lebih banyak eksploratori dan deskriptif, dengan mengantungkan diri kepada analisis kualitatif. Tujuan dari kajian ini bukanlah untuk mencari hubungan sebab dan akibat tetapi lebih kepada mencoba menjelaskan dan memahami bagaimana warga komuniti sebagai aktor utama saling berhubungan dalam komuniti serta pemahaman

mereka tentang nilai-nilai kebersamaan, kebangsaan dan perdamaian melalui organisasi Rukun Tetangga. Pemilihan kawasan penelitian dalam latar perkotaan menjadi terkait untuk memahami perdamaian pada taraf *intra-society* pada *meso-level*. Kategori sosial merupakan isu yang terkait dengan fenomena di kebanyakan kawasan perkotaan di negara modern.

Sumber data adalah informan-informan penting yang terdapat pada komuniti terlibat, yaitu pengurus dan warga Rukun Tetangga. Di samping itu, dilakukan penggunaan data secara kualitatif melalui pemerhatian langsung, temubual serta diskusi kelompok terfokus terhadap para anggota komuniti Rukun Tetangga. Kajian kuantitatif yang memaparkan (*descriptive*) dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisikan serangkaian isian yang harus diisi oleh responden. Oleh demikian pada peringkat analisis, penelitian ini menggunakan metode campuran dengan mengikuti tradisi penelitian kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan kecenderungan yang terjadi pada subjek penelitian yaitu warga yang ada di kawasan Rukun Tetangga. Oleh itu, secara tradisional penelitian ini dapat digolongkan kepada pendekatan alami (*naturalistic approach*) yang berusaha untuk mencari fakta untuk memahami fenomena dalam keadaan yang terikat dengan konteks. Jika penelitian kuantitatif bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat, peramalan, dan kesimpulan umum dari temuan, maka penelitian ini tidak bermaksud demikian. Analisis kuantitatif yang digunakan di sini

hanyalah bertujuan untuk memberikan ketepatan terhadap pengukuran dari fenomena yang diselidiki.

Sampel di Kota Padang diambil secara bertingkat (*stratified sampling*). Dengan pemukiman penduduk Cina berupa *enclave* sebagai peninggalan dari pemerintahan kolonial, maka hanya dua kecamatan yang memiliki penduduk Cina yang bermakna. Dari dua kecamatan, maka kecamatan Padang Selatan merupakan lokasi penelitian. Pada tahap pertama, dari 8 kelurahan di kecamatan Padang selatan diambil 2 kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki 8 sampai dengan 20 Kawasan Rukun Tetangga, dengan demikian tiap-tiap kelurahan terdiri dari 2 Rukun Tetangga. Pada kawasan penelitian di Padang didapati 28 Kawasan Rukun Tetangga, dengan demikian kawasan yang diambil memiliki kadar 14%. Langkah ini dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan dengan pengambilan lokasi penelitian di Alor Star.

IV. HASIL PENELITIAN

Temuan Pengukuran Batas Etnik

Dalam bagian ini responden ditanyakan tentang beberapa kasus hipotetikal dengan pilihan jawaban yang secara tersamar menunjukkan afiliasi kepada ciri etnik tertentu. Pilihan jawaban akan menunjukkan sejauh mana kadar kecairan batas etnik yang dimiliki responden. Analisis akan diberikan terhadap nisbah pilihan yang diberikan oleh warga komunitas sehingga dapat diambil sebuah kesan dan pola

jawaban yang menunjukkan apakah sebuah komunitas terdiri dari warga komunitas wilayah yang memiliki batas etnik yang tebal ataupun tipis. Batas etnik yang tebal akan menciptakan komunitas yang eksklusif, manakala batas etnik yang tipis menunjukkan potensi inklusif dan peluang yang lebih besar untuk berinteraksi lintas batas etnik dari warga komunitas yang dimaksud.

Untuk negara dimana pluralisme atau kemajmukan telah diterima sebagai satu landskap sosial negara dan identitas etnik adalah sekunder dan bukan primer. Keupayaan untuk membaca perubahan sosial masyarakat ini lahir dalam meletakkan masalah identitas dan pembentukan kelompok dalam proses ikatan individu dan kelompok. Pengukuran ikatan ini dilakukan dengan meletakkan responden Melayu dan Cina dalam kedudukan konflikual, di antara norma sejabat dan pilihan etnik. Dalam menggali preferensi mereka maka dihadapkan kepada pertanyaan yang mengandung suasana sosial hipotetikal yang berlegar pada aktor-aktor etnik yang telah dikenaplasti dan identik.

Berdasarkan tiga kasus hipotetikal di atas, secara keseluruhan temuan yang diperoleh menunjukkan batas etnik dalam kalangan responden di Alor Star ketika variabel etnik berhadapan dengan material adalah cukup tipis. Responden memberikan jawaban positif dengan mendahulukan perkiraan material dan bukan perkiraan etnik pada ketiga kasus hipotetikal yang diberikan. Pernyataan ini didukung oleh data jawaban responden terhadap kasus sewa rumah kedai dan rekan kongsi.

Responden Melayu secara sangat signifikan (83.5 persen) bersetuju dengan penyewaan rumah kedai dari Lim Lam Seng kepada Abdul Azis yang berbeda etnik. Ketajaman jawaban yang sama juga ditemukan dalam kalangan responden Cina dengan capaian angka menyentuh 78.6 persen.

Kasus kedua juga menunjukkan kedua kelompok responden lebih memilih Khon Chow Yong sebagai rekan perniagaan bagi Malik yang berbeda etnik. Namun demikian jawaban kasus kedua memiliki tingkat signifikansi yang tidak begitu tinggi, 57.6 persen bagi etnik Melayu dan 64.3 persen bagi etnik Cina. Sedikit menarik hasil yang didapatkan pada kasus ketiga tentang kedai langganan yang dipilih oleh Lim Lam Seng. Walaupun secara akumulatif 50.4 persen dari jumlah responden memilih Samad yang memiliki etnik berbeda. Namun dalam kalangan responden bangsa Cina jawaban yang diberikan untuk berbelanja di kedai sesama etnik (38.1 persen) hanya sedikit di bawah pilihan untuk berbelanja di kedai yang antara etnik (40.5 persen)

Jawaban responden di Padang terhadap ketiga kasus hipotetikal memiliki pola yang sama. Pada kasus sewa rumah kedai, baik bangsa Melayu maupun bangsa Cina secara dominan bersetuju jika transaksi antara Lim Lam Seng dan Abdul Azis melintasi batas etnik, sangat signifikan dengan angka 85.3 persen bagi bangsa Melayu dan bahkan 98.6 persen pada bangsa Cina. Dalam kasus pilihan rekan kongsi bagi Malik, 66.7 persen bangsa Melayu setuju dengan menembus batas etnik, manakala 81.9 persen

dari bangsa Cina setuju. Pada kasus kedai langganan, kemaknaan angka ini menurun, namun tetap dominan pada capaian 70.7 persen dari responden Melayu dan 61.1 persen pada bangsa Cina. Terdapat batas etnik yang tipis pada kedua etnik jika dihadapkan dengan faktor material (dengan angka rerata sekitar 80 persen).

Dalam dimensi pengukuran kepentingan pribadi berbentuk status sosial, kasus hipotetikal yang diberikan adalah dalam hal undangan kawin, pergi kenduri dan anak angkat. Hasil penelitian dari Alor Setar, pada kasus undangan kawin, jawaban terbanyak masih berdimensi lintas etnik yaitu 50.6 persen bagi etnik Melayu dan 42.9 persen etnik Cina. Pada kasus pergi kenduri, etnik Melayu lebih memberikan jawaban positif dengan capaian 52.9 persen, manakala hanya sebanyak 31.0 persen dari responden etnik Cina menjawab sama. Sejumlah 40.5 persen responden Cina menjawab lain-lain, hal ini bermakna mereka tidak menunjukkan sikap dalam tanggapan terhadap kasus ini. Kasus anak angkat menunjukkan pola yang sama pada kedua-dua kelompok responden. Mereka lebih bersetuju jika Mustapha mengambil anak angkat Melayu, dengan jawaban 77.6 persen bagi etnik Melayu dan 73.6 persen etnik Cina.

Sementara itu di Padang bagi kasus undangan kawin dan pergi kenduri tidak ada jawaban yang terlalu dominan. Kajian mendapati ambiguiti atau sikap ganda dari responden. Bagi kasus undangan kawin secara akumulatif 37.4 berpendapat lintas etnik, 34.0 menjawab lain-lain. Demikian juga

pola yang sama pada kasus kenduri. 46.3 persen melintasi batas etnik, 40.8 tidak memberikan sikap yang jelas. Lagipula pada kasus anak angkat kedua kelompok memiliki 61.1 persen pendapat bahwa anak angkat semestinya tidak melintasi batas etnik. Dengan demikian dalam hal berhadapan dengan status, batas etnik komunitas yang diselidiki masih cukup tebal dengan jumlah responden menyentuh 31 persen.

Pada kasus Musa sebagai ketua, kedua-dua kelompok responden memiliki jawaban yang cukup samar dengan 48.2 persen responden menjawab ya namun 42.4 persen menjawab tidak. Pola yang sama ditemukan pada responden Cina, 40.5 persen menjawab ya dan lebih dari 45 persen menjawab tidak. Perbedaan yang ditemukan mungkin saja disebabkan karena kasus yang diberikan menempatkan Musa, sebuah nama yang berkonotasi Melayu sebagai pusat dalam kasus hipotetikal. Dengan demikian perbedaan beberapa angka komposisi menurut peneliti tidak memiliki makna yang terlalu penting.

Namun demikian, dalam kasus kedua yaitu dalam pergantian antara Daud dengan Wong See Min, kedua kelompok responden memberikan jawaban yang sama dengan 86.5 persen bagi etnik Melayu dan 64.3 persen etnik Cina menjawab secara positif. Meskipun demikian batas etnik Melayu dalam kasus ini lebih tipis. Kasus ketiga memiliki pola yang sama dengan kasus kedua. Pada prinsipnya responden tidak berkeberatan untuk memberikan kepercayaan dan kerjasama melintasi batas etnik dengan capaian angka kumulatif pada 67.7 persen. Ini

adalah kecenderungan yang positif dalam melintasi batas etnik.

Dalam aspek ketiga batas etnik berhadapan dengan ikatan sosial, terdapat pola yang agak jelas. Dalam kasus ketua dari dominasi Cina kelompok Melayu terbagi dalam dua sikap yang bertentangan. Sikap responden etnik Cina lebih jelas, yaitu 56.9 persen menjawab tidak bersedia. Namun dalam dua kasus berikutnya, responden memiliki sikap yang berbeda.

Pada kasus Daud menggantikan Wong See Min, sebanyak 70.7 persen dari responden Melayu setuju, bahkan etnik Cina menyentuh angka 80.6 persen. Dalam meninggalkan kunci rumah juga memperlihatkan batas etnik yang cukup tipis. Kedua etnik secara seimbang berpendapat sekitar 78 persen setuju meninggalkan kunci rumah dengan jiran yang berbeda etnik. Secara rerata persentase lintas batas etnik pada aspek ikatan sosial memiliki angka 63 persen. Dalam hal batas etnik berhadapan dengan material, data menunjukkan bahwa batas etnik adalah tipis. Bahkan untuk pertanyaan kasus sewa rumah kedai, batas etnik pupus sama sekali. Hanya pada kasus kedai langganan Lim Lam Seng baik etnik Cina di kawasan risiko dan di rerata perkotaan mendapat jawaban berturut-turut 15.8 persen dan 40.5 persen.

Pada ketika batas preferensi etnik berhadapan dengan status sosial dilihat batas etnik mendapatkan tantangan. Tidak ada jawaban yang lebih dari 60 persen. Kedua etnik boleh dikatakan masih ragu-ragu untuk menembus batas etnik jika dihadapkan kepada status, meskipun etnik Melayu masih memberikan

jawaban positif manakala dihadapkan dengan kasus undangan kawin Lim Lam Seng dan Lim Lam Seng pergi kenduri Datuk Idris dengan angka 54.8 persen di kawasan aman, 51.2 persen di kawasan risiko dan 52.9 persen untuk rerata perkotaan. Kasus anak angkat adalah isu yang paling tidak menarik bagi kedua etnik untuk melintasi batas etnik mereka, tidak ada jawaban positif yang melebihi angka 15 persen.

Hubungan sosial sebenarnya merupakan isu yang paling penting dalam hubungan antara etnik. Data menunjukkan hubungan sosial yang bermuatan politik belum mampu menembus batas etnik, artinya batas etnik masih tebal. Hal ini terlihat dari jawaban responden terhadap kasus diangkatnya Musa sebagai ketua organisasi yang didominasi oleh etnik Cina. Hanya etnik Melayu di kawasan risiko yang memberikan jawaban positif menyentuh angka 53.5 persen. Dalam hal hubungan kepercayaan Lim Lam Seng kasus meninggalkan rumah dan kasus kerjasama bekerja (Daud menggantikan Wong Seng Min) dilihat batas etnik mulai menipis bahkan pupus. Hanya di kawasan risiko etnik Cina dengan jawaban 36.8 persen terlihat belum memberikan kepercayaan lintas batas etnik kepada etnik lain untuk meninggalkan kunci rumah dengan jawaban positif hanya 36.8 persen.

Bagi pertanyaan pilihan etnik berhadapan dengan material. Dalam kasus sewa rumah kedai semua kelompok menunjukkan batas etnik yang sangat tipis bahkan hampir pupus. Namun untuk kasus rekan kongsi Malik etnik Cina di kawasan

aktif menjawab hanya 43.8 persen. Demikian juga dengan kedai langganan Lim Lam Seng, etnik Melayu lebih memiliki batas etnik yang tipis dibandingkan dengan etnik Cina. Melayu di Rukun Tetangga aktif menyentuh 59.2, dan di kawasan kurang aktif 50.0. Etnik Cina di kawasan aktif 37.5 dan di kawasan kurang aktif 42.3.

Etnik Melayu juga dilihat memiliki batas etnik yang tipis dalam kasus-kasus yang menghadapi preferensi etnik dengan status sosial. Bagi kasus undangan kawin kedua etnik memiliki skor yang berbeda tipis, namun cukup baik. Agak ekstrim perbedaan dalam kasus Lim Lam Seng pergi kenduri datuk Idris. Kawasan Rukun Tetangga aktif Melayu 46.9, Cina 18.8. Bagi kawasan Rukun Tetangga kurang aktif etnik Melayu 61.1 dan Cina 38.5. Dalam kasus anak angkat batas etnik kedua etnik terlihat sangat tebal.

Markah yang didapati pada pertanyaan yang menghadapi pilihan etnik dengan hubungan sosial memberikan skor yang baik. Sehingga tercermin bahwa batas etnik sangat tipis, terutama dalam kasus Daud menggantikan Wong See Min dan Lim Lam Seng meninggalkan rumah. Dalam kasus bernuansa politik yaitu Musa diandaikan menjadi ketua dari organisasi yang didominasi Cina hanya etnik Melayu yang menyatakan persetujuan di kawasan Rukun Tetangga aktif dengan angka 53.1 persen, sedangkan etnik Cina sebanyak 18.8 persen. Angak sebaliknya dicatat pada kawasan Rukun Tetangga kurang aktif yaitu 41.7 persen etnik Melayu dan 53.8

persen untuk etnik Cina memberikan jawaban positif.

Terdapat batas etnik yang tipis bahkan pada kasus tertentu pada saat orientasi etnik dihadapkan dengan pilihan materi. Kasus sewa rumah kedai adalah kasus yang paling pupus batas etniknya dengan semua jawaban menyentuh lebih dari 80 persen. Hanya etnik Cina di kawasan risiko yang menjawab dengan 18.5 persen dalam kasus kedai langganan Lim Lam Seng. Batas etnik menjadi agak tebal pada saat preferensi etnik dihadapkan dengan status sosial. Daerah aman menunjukkan variasi yang agak baik, baik dalam kasus undangan kawin maupun undangan kenduri Datuk Idris. Pengambilan anak angkat merupakan kasus yang paling mendapat respon negatif dari responden.

Hubungan sosial mendapat respon positif dari semua responden, baik Melayu maupun Cina, baik kawasan aman maupun kawasan risiko. Keadaan ini hanya mendapat tantangan pada saat responden dihadapkan kepada sebuah kasus yang mengandung unsur kekuasaan dan politik, yaitu diangkatnya Musa sebagai ketua syarikat yang didominasi oleh etnik Cina. Sama ada etnik Melayu maupun Cina memberikan jawaban yang rendah, yaitu di bawah 50 persen. Batas etnik pada kasus dimana pilihan etnik dihadapkan dengan material relatif tipis. Bahkan dalam kasus sewa rumah kedai Lim Lam Seng batas etnik adalah pupus sama sekali. Meskipun demikian pada kasus rekan kongsi Malik responden Malyu di kawasan Rukun Tetangga kurang aktif mendapatkan skor sangat rendah, yaitu 13.3 persen.

Dalam hal pilihan keetnikan dihadapkan dengan status sosial didapati jawaban yang tidak begitu tinggi. Bahagian jawaban terbaik hanyalah 50 persen dan itu ditemukan pada jawaban etnik Melayu di Rukun Tetangga aktif pada kasus undangan kawin Lim Lam Seng serta jawaban etnik Cina pada kasus Lim Lam Seng pergi kenduri datuk Idris. Skor yang didapatkan pada Rukun Tetangga aktif selalu lebih tinggi dari Rukun Tetangga kurang aktif. Dengan demikian batas etnik di kawasan Rukun Tetangga kurang aktif pada kasus yang dihadapkan dengan status sosial adalah tebal. Namun batas etnik yang sangat tebal ditunjukkan dalam kasus anak angkat.

Batas etnik dalam hal hubungan sosial relatif tipis. Hal ini didapati dari respons sumber data terhadap kasus Daud menggantikan Wong See Min dan Lim Lam Seng tinggalkan rumah. Dalam kedua kasus ini batas etnik tipis atau pada beberapa jawaban pupus sama sekali. Namun pada kasus Daud menjadi ketua yang didominasi etnik Cina batas etnik yang tebal ditunjukkan pada Rukun Tetangga aktif dengan jawaban etnik Melayu 26.3 persen dan etnik Cina 29.4 persen. Dalam kasus ini jawaban responden di kawasan Rukun Tetangga kurang aktif yaitu 60.1 persen dan 59.1 persen lebih tinggi dari rerata perkotaan.

Analisis Batas Etnik

Berdasarkan ketiga kasus hipotetikal yang diberikan, secara keseluruhan data yang diperolehi menunjukkan batas etnik di kalangan responden di Alor Setar ketika variabel etnik

berhadapan dengan material adalah cukup tipis. Responden memberikan jawaban yang positif dengan mendahulukan pertimbangan material dan bukan pertimbangan etnik pada ketiga kasus hipotetikal yang diberikan. Kesimpulan ini didukung oleh data jawaban responden terhadap kasus sewa rumah kedai dan rekan kongsi. Responden Melayu maupun Cina bersetuju secara signifikan dengan penyewaan rumah kedai dari Lim Lam Seng dan kepada Abdul Azis. Dalam kasus rekan berniaga Malik jawaban lebih memilih Khon Chow Yong namun dengan kadar kebermaknaan yang lebih rendah sehingga menunjukkan bahwa batas etnik pada responden adalah tipis. Sementara untuk kedai langganan yang dipilih oleh Lim Lam Seng terdapat perbedaan responden Cina yang lebih memilih untuk berbelanja di kedai yang sesama etnik.

Jawaban responden di Padang terhadap ketiga-tiga kasus hipotetikal memiliki pola yang sama dengan di lokasi Alor Setar. Bagi kasus sewa rumah kedai, baik etnik Melayu maupun etnik Cina secara dominan bersetuju jika transaksi antara Lim Lam Seng dan Abdul Azis melintasi batas etnik dan menandakan batas etnik sudah pupus. Dalam kasus rekan berniaga etnik Melayu dengan batas etnik yang tipis dan etnik Cina bahkan pupus. Namun pada kasus kedai langganan, makna yang diberikan oleh angka ini menurun namun tetap dikuasai pada kisaran batas etnik yang tipis. Analisis batas etnik mengikut variasi lokasi penelitian di Alor Setar menunjukkan beberapa temuan. Dalam hal batas etnik berhadapan

dengan material, data menunjukkan bahwa batas etnik adalah tipis tanpa ada variasi antara kawasan aman dan risiko. Bagi pertanyaan pilihan etnik berhadapan dengan material, etnik Melayu di Rukun Tetangga aktif memberikan jawaban lebih positif.

Didapati batas etnik yang tipis bahkan pada kasus tertentu pada saat pilihan etnik dihadapkan dengan pilihan material di Padang. Hanya etnik Cina di kawasan risiko yang menjawab sangat negatif terhadap kasus kedai langganan Lim Lam Seng. Hal yang sama terjadi dengan variasi keaktifan. Batas etnik pada kasus dimana pilihan etnik berhadapan dengan material relatif tipis. Dalam kasus sewa rumah kedai Lim Lam Seng batas etnik adalah pupus sama sekali. Meskipun demikian pada kasus rekan kongsi Malik responden etnik Melayu di kawasan Rukun Tetangga kurang aktif mendapatkan skor sangat rendah, dengan demikian batas etnik dalam kasus ini adalah tebal.

Dalam dimensi pengukuran kepentingan pribadi berbentuk status sosial, kasus hipotetikal yang diberikan adalah dalam hal undangan kawin, pergi kenduri dan anak angkat. Bagi jawaban responden di Alor Setar dalam kasus undangan kawin masih mempunyai dimensi antara etnik, namun saat ini dengan batas etnik yang tidak terlalu tipis. Pada kasus pergi kenduri etnik Melayu lebih memberikan jawaban positif namun tidak demikian dengan etnik Cina. Dengan demikian batas etnik tebal dalam kalangan etnik Cina.

Sementara itu bagi kasus anak angkat terdapat pola yang sama pada kedua-dua kelompok responden, yaitu tidak ada lintas etnik, karena

batas yang sedemikian tebal. Nampaknya masih ada batas yang tidak boleh ditembusi dengan mudah jika sudah bersangkutan kepada ikatan keluarga, yaitu memiliki implikasi kepada ikatan yang lebih rapat. Masalah keturunan adalah masalah sensitif, dan pilihan pribadi lebih kuat dalam hal ini, tidaklah menghairankan sekiranya batas etnik sangat tebal.

Temuan di Padang menunjukkan bahwa status dilihat bukanlah sebuah hal yang menarik bagi kedua etnik jika dihadapkan dengan batas etnik. Bagi kasus undangan kawin dan pergi kenduri tidak ada jawaban yang terlalu dominan. Kajian mendapati percanggahan seperti sikap mendua dari responden. Jika jawaban lintas etnik yang menjadi pedoman, maka batas etnik tebal. Bagi kasus menghadiri kenduri, batas etnik tebal dan lebih tebal lagi untuk kasus anak angkat. Tertamanya dalam kasus anak angkat sama ada responden Melayu maupun responden Cina tidak bersedia untuk bertolak ansur.

Berdasarkan variasi tingkat keamanan di Alor Setar, etnik Melayu memberikan jawaban positif ketika dihadapkan dengan kasus undangan kawin Lim Lam Seng dan Lim Lam Seng pergi kenduri Datuk Idris dengan perbandingan yang tipis antara di kawasan aman dan di kawasan risiko. Perbedaan agak ekstrim didapati pada kasus Lim Lam Seng pergi kenduri datuk Idris. Jawaban yang diberikan di Rukun Tetangga kurang aktif justru memberikan kesan lebih positif jika dibandingkan dengan kawasan Rukun Tetangga aktif.

Batas etnik menjadi agak tebal di Kota Padang pada saat pilihan etnik berhadapan dengan status. Walau bagaimanapun, daerah aman menunjukkan variasi yang agak baik, baik dalam kasus undangan kawin maupun undangan kenduri Datuk Idris. Bahagian jawaban terbaik ditemukan pada jawaban etnik Melayu di Rukun Tetangga aktif dalam kasus undangan kawin Lim Lam Seng dan jawaban etnik Cina pada kasus Lim Lam Seng pergi kenduri datuk Idris. Nisbah yang didapati pada Rukun Tetangga aktif selalu lebih tinggi dari Rukun Tetangga kurang aktif. Dengan demikian batas etnik di Rukun Tetangga kurang aktif pada kasus yang berhadapan dengan status adalah tebal.

Batas Etnik dan Ikatan Sosial

Dalam dimensi dimana batas etnik berhadapan dengan ikatan sosial pada responden di Alor Setar terdapat jawaban yang menunjukkan pola menuju pelintasan batas etnik dengan variasi tertentu dalam jawaban. Pada kasus Musa sebagai ketua, batas etnik masih cukup tebal baik dalam kalangan responden Melayu maupun Cina meskipun dengan kadar yang berbeda. Perbedaan yang ditemukan mungkin saja disebabkan karena kasus yang diberikan menempatkan Musa, sebuah nama yang berkonotasi Melayu sebagai panduan dalam kasus hipotetikal ini. Dengan demikian perbedaan yang dijumpai pada jumlah jawaban responden menurut penyelidik tidak memiliki makna.

Namun demikian, dalam kasus kedua dalam pergantian antara Daud dengan Wong See Min, batas etnik

bagi etnik Melayu adalah pupus manakala dalam kalangan responden etnik Cina tipis. Kasus ketiga memiliki pola yang sama dengan kasus kedua. Pada prinsipnya responden tidak keberatan dalam memberikan kepercayaan dan kerjasama melintasi batas etnik ini adalah kecenderungan positif dengan tipisnya batas etnik.

Berdasarkan jawaban responden di Kota Padang ketika batas etnik berhadapan dengan ikatan sosial, terdapat pola yang agak jelas. Dalam kasus ketua dari dominasi Cina kelompok Melayu terbahagi kepada dua sikap yang bertentangan. Sikap responden Cina lebih jelas dengan jumlah terbesar dengan demikian batas etnik tebal. Manakala pada kasus Daud menggantikan Wong See Min dengan kesan kerjasama dalam berkerja batas etnik menjadi tipis bahkan pupus pada etnik Cina. Dalam meninggalkan kunci rumah juga memperlihatkan batas etnik yang cukup tipis. Dengan demikian kepercayaan antara etnik untuk menjaga harta kekayaan sebetulnya cukup tinggi.

Hubungan sosial sebenarnya merupakan isu yang paling penting dalam analisis dan kajian hubungan antar etnik. Data di Alor Setar menunjukkan hubungan sosial yang mempunyai aspek politik belum mampu menembus batas etnik, maknanya batas etnik masih tebal. Hal ini dilihat dari jawaban responden terhadap kasus diangkatnya Musa sebagai ketua organisasi yang didominasi oleh etnik Cina. Hanya etnik Melayu di kawasan risiko yang memberikan jawaban positif. Dalam hal hubungan kepercayaan Lim Lam Seng kasus

tinggalkan rumah dan kasus kerjasama bekerja (Daud menggantikan Wong Seng Min) dilihat batas etnik mulai metipis bahkan pupus. Hanya di kawasan risiko etnik Cina dilihat belum memberikan kepercayaan lintas batas etnik kepada etnik lain untuk meninggalkan kunci rumah sebagai penanda dari harta kekayaan.

Dalam kasus yang mengandung aspek politik yaitu Musa diandaikan menjadi ketua dari organisasi yang didominasi Cina hanya etnik Melayu yang menyatakan persetujuan di Rukun Tetangga aktif jawaban sebaliknya dicatat pada Rukun Tetangga kurang aktif etnik Cina memberikan angka yang lebih baik dan menunjukkan batas etnik yang tipis dibandingkan dengan etnik Melayu. Hubungan sosial mendapat respon positif dari semua responden di Padang, baik Melayu maupun Cina, baik Rukun Tetangga aman maupun Rukun Tetangga risiko. Keadaan ini hanya mendapat tantangan pada saat responden dihadapkan kepada sebuah kasus yang mengandung unsur kekuasaan dan politik, yaitu diangkatnya Musa sebagai ketua syarikat yang didominasi oleh etnik Cina. Tidak ada perbedaan variasi antara daerah aman dan risiko. Batas etnik dalam hal hubungan sosial relatif tipis. Namun pada kasus Daud menjadi ketua yang didominasi etnik Cina batas etnik yang tebal ditunjukkan pada Rukun Tetangga aktif. Dalam kasus ini jawaban responden di Rukun Tetangga kurang aktif lebih tinggi dari rerata perkotaan

V. PENUTUP

Dengan analisis di atas didapatkan sebuah *commonalities* dalam kasus Malaysia dan Indonesia. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa orang Melayu di Malaysia atau ras Melayu di Indonesia (termasuk Aceh, Minang, Bugis, Banjar dan lain lain), dengan meminjam konsep klasifikasi *permeable and canopy ethnicity* Hefner masih menganggap orang Cina sebagai bangsa lain yang tinggal di wilayah mereka. Hal ini diperkuat dengan ciri-ciri askriptif dan kategorikal yang ditunjukkan oleh nama (terutama di Malaysia) dan fisik. Dengan demikian manajemen masyarakat ragam budaya di kedua negara harus menempatkan upaya-upaya sosial, ekonomi dan politik untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa yang sedang dalam proses pembentukan ini (*nation in the making*). Dalam konteks inilah hubungan antara etnik yang lintas batas sosial baik berupa bentuk hubungan sehari-hari (*everyday forms of engagement*) dan hubungan insitusi (*associational forms of engagement*) adalah satu-satunya alternatif di peringkat akar rumput yang dapat meningkatkan rasa percaya, kenal mengenal, rasa senasib sepenanggungan dan pada akhirnya kerukunan dan harmonis dalam hubungan etnik.

Jika merujuk kepada konsepsi yang dikenal secara umum dalam ilmu sosial bahwa civil society adalah institusi yang (1) berada di antara keluarga, di satu sisi dengan negara, di sisi lain (2) menciptakan hubungan dan kaitan di antara sama ada individu dan keluarga, dan (3)

bebas dari pengaruh negara, maka Rukun Tetangga adalah sebuah bentuk dari civil society. Demikian juga jika pengertian tersebut di tambahkan dengan dua macam persyaratan yaitu, dimana (1) ruang dan institusi civic tersebut mengandung juga keperluan di bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik dari warga, serta (2) insitusi tersebut haruslah modern dan sukarela, maka Rukun Tetangga adalah sebuah bentuk dari *civil society*.

Kesimpulan di atas didukung oleh temuan penelitian di Malaysia dan Indonesia yang sudah diuraikan dalam bagian bab-bab sebelumnya dalam karya ini. Dengan menyederhanakan Rukun Tetangga di kedua negara mengandung ciri-ciri *civil society* dalam aspek-aspek yang mengandung hubungan lintas batas etnik (*interethnic atau cross-cutting social ties*) dalam aspek:

1. Masyarakat dalam Rukun Tetangga memiliki taraf komunikasi yang sangat baik, dengan melaksanakan hubungan sehari-hari terutama yang berlangsung sangat intensif adalah dengan bertegur sapa, perayaan hari besar, undangan dalam aktivitas sosial, solidaritas dalam musibah, dan kesepakatan untuk membersihkan hubungan dan isu perkauman dari wacana politik.
2. Secara institusi wilayah terlihat adanya kepuasan yang tinggi dalam kehidupan wilayah dalam wilayah Rukun Tetangga, sensitifitas terhadap trauma konflik etnik sehingga warga sangat berhati-hati (*defensive*) dalam hal ini, tidak ada diskriminasi antara etnik tetapi antara kelas sosial, atmosfer kehidupan keagamaan yang baik,

- baiknya persekitaran semula jadi, baiknya keamanan, relatif baiknya perkhidmatan publik.
3. Manajemen dalam bidang sosial seperti keagamaan, kematian, organisasi permodalan, organisasi NGO, organisasi kesenian, politik, serta olahraga.
 4. Meskipun dibentuk berdasarkan skema kebijakan yang dihasilkan oleh negara, namun keikutsertaan warga dalam organisasi apalagi aktivitas dalam Rukun Tetangga adalah sukarela (*voluntaristic*). Hal ini ditunjukkan dengan belum begitu tingginya tingkat partisipasi warga meskipun mereka merasakan bahwa Rukun Tetangga memberikan manfaat bagi mereka terutama dalam meningkatkan semangat keji-ranan, toleransi, keselamatan, walaupun belum berpengaruh banyak kepada rasa menerima perbedaan dan peningkatan kesejahteraan.
 5. Rukun Tetangga sudah dikelola secara modern, di Padang pengurus Rukun Tetangga dipilih (*elected*) secara demokratis, meskipun pengurus Rukun Tetangga yang berhasil berkemungkinan besar dipilih kembali. Sudah ada pembagian kerja (*division of authority*) dalam Rukun Tetangga secara baik, setidaknya dalam hal ketua, bendahari, setiausaha. Dalam hal pembagian penanggungjawab aktivitas, Rukun Tetangga di Kota Padang mempunyai hubungan kerja yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pada tingkatan lebih lanjut warga juga memiliki visi untuk memperkuat institusi melalui pembuatan perancangan strategik, kerjasama organisasi, daya fleksibiliti, audit organisasi dan berbagai modernisasi organisasi di masa hadapan.
 6. Rukun Tetangga menjadi institusi yang menjebatani hubungan antara negara dengan masyarakat di peringkat komunitas. Secara jelas ini terlihat dari fungsi awal Rukun Tetangga untuk berpartisipasi dalam menjaga keselamatan di peringkat wilayah mereka. Selanjutnya Rukun Tetangga juga menjadi semacam radar untuk meng-identifikasi masalah-masalah sosial dan yang cukup penting dalam memberikan informasi tentang kebijakan Negara kepada masyarakat serta memelihara terjaganya simbol-simbol dan etos bangsa di peringkat komunitas.
- Selain itu Rukun Tetangga memiliki potensi yang besar dalam membina perdamaian. Secara teoritik, dengan semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan dalam Rukun Tetangga apalagi dengan peningkatan partisipasi dan keterlibatan interethnic yang terjadi akan semakin meningkatkan rasa saling kenal, saling ketergantungan dan solidariti di antara warga. Dengan komunikasi yang tercipta di antara warga yang beragambudaya maka perdamaian di peringkat komunitas akan tumbuh. Komunikasi dan rasa saling memiliki ini menjadi peredam bagi timbulnya berbagai isu sosial. Rasa aman juga tumbuh dengan keyakinan akan rasa saling menjaga di keji-ranan. Varshney dalam penelitiannya bahkan menemukan bahwa pada masyarakat asosiasional yang aktif menjadi benteng pertahanan

sosial yang ditunjukkan pada saat isu nasional yang membara yang dipicu oleh penghancuran mesjid Baburi di Ayodhya, kemudian menyebar menjadi rumor, ketegangan dan rusuhan secara nasional, menjadi padam dan mampu diredam di Kalkuta (Calicut), negara bagian Kerala di India Selatan. Politisi yang ingin menjadikan isu komunalisme dan perkauman menjadi komoditas kempen politik mereka akan menemukan tembok yang tebal, sehingga multi-kulturalisme dalam arti yang esensial dan demokratis akan tercipta.

Keberadaan Rukun Tetangga di kawasan urban juga menjadi argumentasi penting dalam potensi ini. Secara sosiologis, kawasan perumahan urban adalah terdiri dari pendatang-pendatang yang mencari kehidupan yang lebih baik, hampir semua mereka datang dari kawasan-kawasan daerah asal yang berbeda-beda. Dengan arus urbanisasi ini mereka meninggalkan solidaritas tradisional yang berbasiskan primordialisme genealogis dan komunalisme di daerah asal mereka yang damai. Kehidupan perkotaan yang keras dan kompetitif memerlukan tumbuhnya rasa komunalisme baru, melalui aktivitas dan kontak wilayah dalam Rukun Tetangga rasa ini tumbuh.

1. Kaum Melayu kurang cukup memberikan apresiasi dan dan respek kepada agama dan perjalanan aktivitas keagamaan etnik lain, dengan demikian ini membuktikan bahwa agama menjadi batasan yang tidak bisa ditawarkan bagi etnis Melayu;
2. Batas etnik dalam hal status masih tebal, meskipun dalam hal

material dan ikatan sosial dapat ditembus. Dimensi politik dalam ikatan sosial merupakan sebuah wilayah yang memiliki ketebalan tertentu dan;

3. Belum adanya lintas batas etnik dalam hal beberapa aktivitas yang potensial seperti sukan. Ditemukan bahwa sukan masih merupakan wilayah yang sangat kental memiliki dimensi etnisiti dalam aktivitas Rukun Tetangga;

Tentu saja Rukun Tetangga hanyalah sebuah organisasi kejranaan yang memiliki pengaruh dan *modularity* terbatas di wilayah wilayah. Banyak sekali terbukti bahwa upaya positif yang dilakukan di peringkat akar rumput menjadi tidak bergitu berarti karena tidak didukung oleh kebijakan di peringkat negara atau pemerintah daerah. Hal ini juga terbukti dalam beberapa kasus, isu-isu nasional dan global yang disampaikan melalui media dan desas-desus (*rumour*) menjadi penghambat tumbuhnya inisiatif-inisiatif lokal dalam menciptakan perdamaian antara etnik. Pada tingkatan tertentu, taraf kedewasaan dan daya tahan komunitas mendapatkan ujian dan tantangan pada proses ini.

Berdasarkan temuan atau pembahasan dalam keseluruhan kajian ini terdapat beberapa sumbangan yang diberikan kepada teori dan konsep. Penelitian ini dengan sifatnya yang eksploratori dan bukan eksplanatori dengan mengambil posisi pada konteks mikro dan tidak bermaksud untuk mengangkat analisis kepada level makro, dimaksudkan guna mensinergikan 3 (tiga) jenis konsep

guna mengungkapkan fakta dan pemikiran terhadap potensi organisasi kemasyarakatan di peringkat kehiranan dalam menciptakan hubungan antara etnik yang damai. Ketiga konsep tersebut adalah (1) pergaulan antara etnik (*cross cutting social ties* atau *interethnic forms of engagement*) baik berupa insitusi (*organized*) maupun sehari-hari (*quotidian*), (2) batas etnik (*ethnic boundaries*) ketika preferensi etnik berhadapan dengan materi, status dan ikatan sosial dan (3) kumpulan kehiranan (*neighborhood associations*) sebagai modal sosial dalam pembinaan bangsa.

Cross-cutting social ties atau hubungan lintas batas sosial antar etnik pada umumnya dimungkinkan dan memiliki potensi dalam membina keharmonisan. Varshney berkonsepsi hubungan ini bisa dilakukan sama ada melalui insitusi atau asosiasi atau dalam bentuk lain seperti interaksi rutin dalam kehidupan harian seperti menziarahi

hiran, menjemput kenduri dan lain-lain. Penelitian menemukan bahwa dalam konteks Malaysia dan Indonesia hubungan ini menemui kendala dalam aspek aktivitas religi dan keagamaan.

Meskipun komunikasi dan saling apresiasi dalam keagamaan masih dimungkinkan utamanya dalam komunitas Cina tetapi sangat sukar bagi komunitas Melayu yang memeluk agama Islam. Nampaknya nilai-nilai keagamaan yang tidak pluralis meskipun juga tidak boleh disebut fundamentalis dan radikal menjadi kendala. Dengan demikian pada tingkatan tertentu temuan penelitian di India, dalam konflik antara agama memiliki potensi terjadi di lingkungan di Asia Tenggara. Namun demikian temuan penelitian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan logika inferensial untuk mengambil kesimpulan yang lebih general, namun hanya untuk mencari pola kecenderungan dengan pendekatan induktif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM
- Alo Liliweri. 2005. *Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKSI
- Ariel Heryanto & Sumit K Mandal (editor). 2004. *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara: perbandingan dan pertautan antara Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia
- Comber, Leon. 1983. *13 May 1969: A Historical Survey fo Sino-Malay Relations*. Kuala Lumpur: Heinemann Asia
- Dwianto, Raphaella D. 2000. *The Existing Form of Urban Locality Groups in jakarta: Reexamining the RT/RW in the post-New Order Era*. Atmajaya Catholic University Indonesia

- Hefner, Robert W (editor). 2001. *Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press
- I.Wibowo (editor). 2000. *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Diterbitkan atas kerjasama Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina. Jakarta: PT Gramedia
- Landler, Mark. 1998. *Riots Bare Ethnic Hatreds in Indonesia*. *New York Times*, May 8, 1998
- Leo Suryadinata (editor). 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: LP3ES
- Mansor. 1999. *Crossing Ethnic Borders in Malaysia: measuring the fluidity of ethnic identity and group formation*. *Akademika* 55 Julai 1999
- Mansor. 2004 *Managing Ethnic Harmony in Malaysia: Trends and Issues in 2004*. Unpublished paper. Sintok: Universiti Utara Malaysia
- Nurhadiantomo. 2004. *Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial Pro-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shamsul Amri Baharuddin. 2005. Making Sense of National Unity in Malaysia: 'Break-down' versus 'break out' Perspectives. In Abu Daud Silong (ed). 2005. *Readings on Ethnic Relations in a Multicultural Society*. Serdang: Fakulti Pengajian Pendidikan UPM
- Sullivan, J.A. 1980. *Back Alley Neighborhood: Kampung as Urban Community in Yogyakarta*. Melbourne Centre of Southeast Asian Studies Monash University (Working Paper no. 18)
- Vallier, Ivan (editor). 1973.. *Comparative Methods in Sociology: Essays on Trends and Applications*. Published under auspices of the Institute of International Studies University of California Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press
- Yahya Ibrahim. 1995. *Pemandaran dan Kejiranan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Yoshihara, Naoki and Raphaella Dewantari Dwianto. 2003. *Grass roots and the Neighborhood Associations on Japan's Chonakai and Indonesia's RT/RW*. Jakarta:Grasindo